

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan sebuah masalah kompleks yang masih menjadi perhatian negara-negara di dunia khususnya Indonesia. Secara garis besar, kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada kondisi ini, masyarakat yang bisa disebut miskin adalah mereka yang memiliki pendapatan jauh di bawah pendapatan rata-rata suatu daerah sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi standar hidup rata-rata di daerah tempat mereka tinggal. Ketidakmampuan ini seringkali berdampak pada sulitnya akses mereka terhadap fasilitas pendidikan maupun kesehatan (Rahman dkk., 2019a).

Islam melihat kemiskinan sebagai fakta serius yang harus selalu dihadapi oleh seluruh umat manusia. Meskipun tidak bisa dihilangkan, namun kemiskinan bisa diminimalisir melalui kebijakan pemerintah maupun gotong royong masyarakat dalam menyisihkan sebagian hartanya (Habibah, 2023). Hal ini berkaitan dengan Firman Allah SWT. dalam Qur'an Surah Adz-Dzariyat ayat 19 yang menyatakan:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.” (Q.S. Adz-Dzariyat 51:19).

Dalam ayat tersebut mengandung anjuran untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang miskin yang meminta-minta maupun yang tidak meminta karena merasa malu untuk meminta. Berkaitan dengan hal tersebut, Ibnu

Jarir pernah meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda:

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ. قِيلَ: فَمَنْ الْمِسْكِينُ؟ قَالَ: الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَا يُغْنِيهِ وَلَا يُعْلَمُ مَكَانُهُ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَذَلِكَ الْمَحْرُومُ. (رواه ابن جرير عن أبو هريرة)

Artinya: “Bukanlah orang miskin itu yang tidak diberi sebiji dan dua biji kurma atau sesuap dan dua suap makanan. Beliau ditanya, “(Jika demikian) siapakah yang dinamakan miskin itu?” Beliau menjawab, “Orang yang tidak mempunyai apa yang diperlukan dan tidak dikenal tempatnya sehingga tidak diberikan sedekah kepadanya. Itulah orang yang mahrum tidak dapat bagian.” (H.R. Ibnu Jarir dari Abū Hurairah).

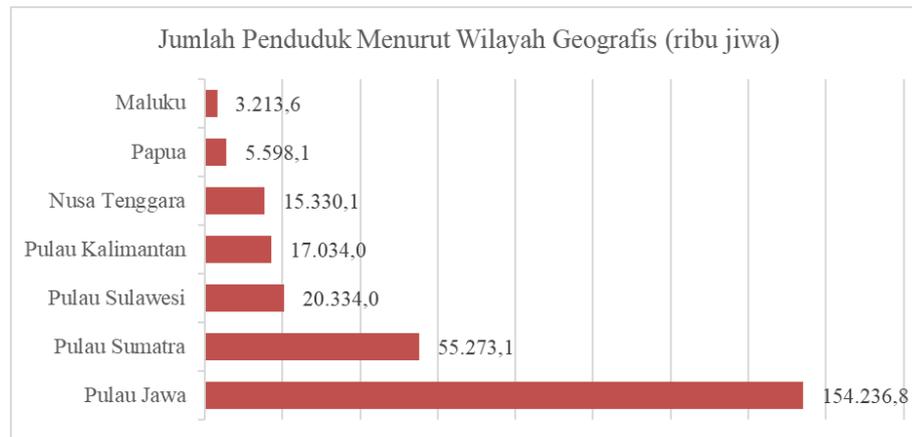
Hadits di atas dapat menjelaskan bahwa dalam pandangan islam, kemiskinan merupakan sebuah kondisi di mana seseorang baik secara individu maupun keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya secara menyeluruh baik itu sandang, pangan, maupun papan. Dalam hal ini, kemiskinan dapat disebabkan oleh dua hal yaitu pendapatan yang berada di bawah rata-rata maupun mereka yang tinggal di daerah terpencil sehingga menyulitkan akses terhadap kebutuhan pokok sehari-hari (Permata dkk., 2023).

Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu perhatian khusus dalam pembangunan ekonomi di mana kemiskinan yang salah satunya disebabkan oleh ketimpangan pendapatan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan merupakan persoalan dasar dan tujuan fundamental dalam pembangunan ekonomi yang mana kemiskinan menjadi sebuah indikator keberhasilan berbagai kebijakan pembangunan (Imanto dkk., 2020). Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi atau instrumen pembangunan adalah dengan melihat efektivitas penurunan jumlah penduduk miskin. Dengan demikian, kemampuan suatu negara dalam menurunkan tingkat

kemiskinan merupakan sebuah titik utama dalam memilih sektor prioritas atau sektor unggulan pembangunan nasional (Ritonga & Wulantika, 2020).

Kemiskinan dicap sebagai permasalahan yang dianggap tidak akan pernah hilang di dunia ini. Oleh karena itu, melalui kesepakatan yang di hasilkan dari pertemuan 189 negara dunia pada tahun 2000 di New York, lahirlah sebuah deklarasi yang akrab dengan sebutan *Millenium Development Goals (MDG's)* yang saat ini telah diperbaharui menjadi *Sustainable Development Goals (SDG's)* (Nawir dkk., 2022). Deklarasi tersebut mencantumkan tujuan “Tanpa Kemiskinan” pada poin pertama, hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan menjadi masalah besar di dunia yang harus diantisipasi bersama. Tidak hanya itu, hal ini juga menjadi penguat negara-negara di dunia khususnya Indonesia untuk mengatasi kemiskinan pada negaranya masing-masing (Dzulqarnain dkk., 2022).

Di sisi lain, kompleksitas kemiskinan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 279 juta jiwa yang tersebar ke beberapa wilayah geografis, yaitu; Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku (Kusuma & Muta'ali, 2019). Menurut Lincoln, banyaknya penduduk pada suatu negara berpotensi menimbulkan berbagai masalah dan tantangan dalam upaya pembangunan. Selain itu, tingginya jumlah penduduk dapat menyebabkan tingginya jumlah tenaga kerja, sedangkan kapasitas yang tersedia tidak mendukung adanya hal tersebut sehingga akan berakibat pada masalah ekonomi lain seperti kemiskinan (Y. A. Sari, 2021).

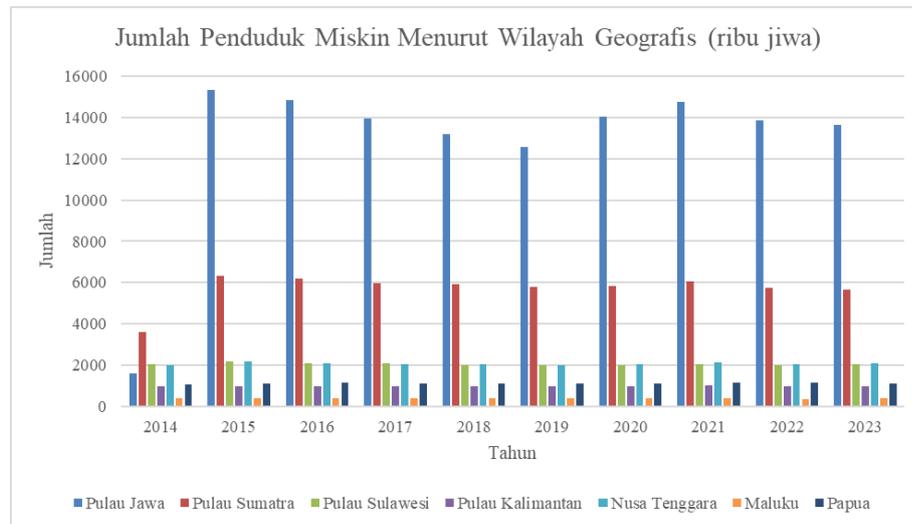


Gambar 1.1

Jumlah Penduduk Menurut Wilayah Geografis Tahun 2023

Sumber: BPS, diolah peneliti (2025)

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Grafik 1.1 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia tersebar dalam wilayah Pulau Jawa, yaitu sebesar 154.236,8 ribu jiwa diikuti Pulau Sumatra sebanyak 55.273,1 ribu jiwa. Sebagai wilayah yang memiliki kepadatan penduduk terbesar serta menjadi pusat pemerintahan di Indonesia, beberapa provinsi yang berada di wilayah Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten memerlukan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemanfaatan jumlah penduduk dengan memfokuskan pada perbaikan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia akan menyebabkan menurunnya tingkat pendapatan sehingga dapat mengakibatkan peningkatan kemiskinan dan menghambat pembangunan ekonomi. Sebaliknya, kualitas sumber daya yang baik akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Salsabil & Rianti, 2023).



Gambar 1.2

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah Geografis 2014-2023

Sumber: BPS, diolah peneliti (2025)

Berdasarkan grafik 1.2 di atas menunjukkan bahwa selama satu dekade terakhir, tingkat kemiskinan tertinggi didominasi oleh wilayah Pulau Jawa. Jumlah penduduk miskin tertinggi yang dialami Pulau Jawa terdapat pada tahun 2015 dengan total penduduk miskin sebanyak 15.312,3 ribu jiwa atau sekitar 15,3 juta jiwa. Sementara itu, pada tahun 2023 penduduk miskin di Pulau Jawa menyentuh angka 13.621,34 ribu jiwa atau sekitar 13,6 juta jiwa. Meskipun terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, jumlah tersebut masih membuat Pulau Jawa menyandang nama wilayah dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia yang selanjutnya diikuti Pulau Sumatra yang memiliki penduduk miskin sebanyak 5.669,17 ribu jiwa atau sekitar 5,7 juta jiwa pada tahun 2023, berbeda cukup jauh dengan Pulau Jawa. Hal ini tentu menjadi titik berat bagi beberapa wilayah administratif yang berada di Pulau Jawa untuk mengatasi masalah

kemiskinan yang terjadi, mengingat Pulau Jawa merupakan wilayah yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus perekonomian nasional (Fauziah dkk., 2021).

Kemiskinan bisa terjadi karena adanya faktor kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Kualitas sumber daya manusia yang rendah akan berdampak pada produktivitas setiap individu maupun masyarakat yang selanjutnya akan mengakibatkan pendapatan yang rendah pula sehingga dapat menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah (Fuady dkk., 2021). Tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat diukur dengan satuan ukuran yang disebut *Human Development Index (HDI)* atau di Indonesia sendiri dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *United Nations Development Programme (UNDP)* menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu maupun masyarakat serta memperluas jangkauan mereka terhadap berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pendapatan, kesehatan, lingkungan yang baik, dan aspek penting lainnya (Muvid, 2022). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, IPM merupakan indikator bagaimana masyarakat dalam suatu wilayah memperoleh pendapatan untuk meningkatkan taraf atau kualitas hidup mereka. IPM dapat dihitung melalui 3 dimensi, yaitu; dimensi umur panjang dan hidup sehat melalui indikator angka harapan hidup, dimensi pengetahuan melalui indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi hidup layak melalui indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan (Yanti & Syarifuddin, 2022).

Di sisi lain, Islam memandang manusia sebagai makhluk sempurna dan menjadi penguasa di bumi. Manusia harus menggunakan seluruh akalunya untuk

memanfaatkan apa yang ada di bumi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan memperhatikan kemaslahatan yang diperoleh darinya. Dalam hal ini, pemanfaatan sumber daya secara optimal menunjukkan baiknya kualitas manusia yang dapat mengantarkan manusia kepada kualitas hidup yang lebih baik pula (Rusmanto dkk., 2020). Untuk mengetahui sejauh mana kualitas dirinya sebagai manusia dalam mencapai kehidupan yang berkualitas, Islam mengajarkan manusia untuk selalu mengingat pada Sang Pencipta Manusia yaitu Allah SWT. sehingga dimensi kualitas manusia dalam Islam tidak hanya berupa materil saja melainkan mencakup aspek spiritual di dalamnya. Oleh karena itu, alat untuk mengukur kualitas manusia dalam Islam dikenal dengan sebutan *Islamic Human Development Index (I-HDI)* yang didasarkan pada lima aspek, yaitu; dimensi agama (*ad-dien*), dimensi jiwa (*an-nafs*), dimensi akal (*al-'aql*), dimensi keturunan (*an-nasl*), dan dimensi harta (*al-maal*) (Nurlayli & Jumarni, 2022).

Salah satu sektor ekonomi yang menjadi tumpuan negara berkembang seperti Indonesia adalah sektor pertanian. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan potensial (Rahmayani dkk., 2023). Semestinya, masyarakat di dalamnya mampu menikmati hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Namun nyatanya tidak demikian, kemiskinan yang terlihat fluktuatif masih menjadi tantangan bagi Indonesia. Tidak hanya itu, di Indonesia sendiri para petani masih erat kaitannya dengan kemiskinan (Arifah dkk., 2023). Jika diperhatikan secara sektoral, kemiskinan di Indonesia berpusat pada sektor pertanian. Terdapat beberapa penyebab para petani di Indonesia berada dalam kategori miskin, salah satunya adalah rendahnya nilai tukar komoditas yang mereka

hasilkan sehingga menyebabkan pendapatan para petani berada di bawah rata-rata (Toumahuw dkk., 2023).

Tabel 1.1

Provinsi dengan Jumlah Tenaga Kerja Pertanian Terbesar di Indonesia

No.	Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian
1.	Jawa Timur	7.149.540
2.	Jawa Tengah	4.883.060
3.	Jawa Barat	3.603.172
4.	Sumatera Utara	2.559.037
5.	Lampung	1.987.969

Sumber: BPS, diolah peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa tiga provinsi di wilayah Pulau Jawa berada di tiga besar provinsi dengan jumlah tenaga kerja sektor pertanian terbesar di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa merupakan wilayah yang paling berpotensi dalam sektor pertanian. Akan tetapi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi (BAPPEPROV) Jawa Timur menyatakan bahwa ketergantungan ekonomi pada sektor pertanian kerap kali dikaitkan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di daerah tersebut (Purba, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan para petani memang perlu diperhatikan bagi daerah yang memiliki sektor pertanian yang potensial. Jika kesejahteraan petani meningkat, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan (N. Rahmawati, 2020).

Menurut BPS, tingkat kesejahteraan petani dapat diukur dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan sebuah indikator yang dapat menggambarkan daya beli petani. Angka rasio ini diperoleh dari selisih antara indeks yang diperoleh petani dari hasil penennya (I_t) dengan indeks yang harus dibayar petani dalam siklus menuju masa panen (I_b) dalam bentuk presentase. Semakin tinggi rasio NTP semakin baik daya belinya (Widi, 2021).

Meskipun NTP dapat menggambarkan kesejahteraan petani, namun satuan ukuran ini bukanlah satu-satunya yang dapat mengukur kesejahteraan petani. Fokus NTP adalah dengan melihat keseimbangan antara pendapatan hasil jual pertanian dengan input produksi yang harus dikeluarkan. Ukuran lain yang dapat mengukur kesejahteraan petani adalah dengan melihat upah buruh para petani itu sendiri di mana upah buruh tani merupakan indikator kesejahteraan petani yang ditinjau dari kemampuan daya beli petani sebagai konsumen (Arham & Adiwibowo, 2022).

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Dwi Nurhatinah Pratiwi (2021) yang berjudul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Nilai Tukar Petani, dan Upah Buruh Tani Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur 2010-2019”. Penelitian ini mengambil IPM sebagai variabel X1, NTP sebagai variabel X2, Upah Buruh Tani sebagai variabel X3, dan Tingkat Kemiskinan sebagai variabel Y. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis *Ordinary Least Square*. Data yang di ambil merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS dengan model data *time series* dengan runtun waktu sepuluh tahun.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa masing-masing variabel X berpengaruh secara parsial negatif dan signifikan terhadap variabel Y. Adapun secara simultan, variabel IPM, NTP, dan Upah Buruh Tani sebagai variabel X berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2010-2019 (Aji, 2021).

Kemudian, penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Afni Okta yang berjudul “Pengaruh Nilai Tukar Petani (NTP) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2017-2022 dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis *Ordinary Least Square*. Data yang di ambil merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS dengan model data *time series* dengan runtun waktu lima tahun.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel Nilai Tukar Petani (NTP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2017-2022 (Afni, 2023).

Penelitian terkait pengaruh IPM, NTP, dan Upah Buruh Tani terhadap Tingkat Kemiskinan masih belum banyak dilakukan khususnya pada wilayah Pulau Jawa yang memiliki potensi pertanian terbesar di Indonesia. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, maka perlu membawa variabel-variabel tertentu yang berkaitan dengan perspektif

ekonomi Islam seperti *Islamic Human Development Index (I-HDI)* sebagai sebuah tolok ukur kualitas manusia dalam perspektif Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait pengaruh kualitas manusia dalam perspektif Islam yang diukur dengan istilah *I-HDI*, kesejahteraan petani yang diukur dengan rasio Nilai Tukar Petani, serta tingkat daya beli petani yang dapat digambarkan melalui Upah Buruh Tani terhadap Tingkat Kemiskinan yang terjadi di Pulau Jawa. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah **“Pengaruh *Islamic Human Development Index (I-HDI)*, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Upah Buruh Tani Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2014-2023”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disajikan, maka penulis mengidentifikasi beberapa poin yang menjadi dasar adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengentasan kemiskinan khususnya dalam tinjauan ekonomi Islam merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah, dalam konteks ini wilayah Pulau Jawa.
2. Konsistensi Pulau Jawa sebagai wilayah dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia.
3. Tingginya jumlah penduduk di Pulau Jawa yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas manusia dapat menyebabkan masyarakat terperangkap dalam jurang kemiskinan.

4. Ketergantungan sektor pertanian pada suatu wilayah khususnya Pulau Jawa memiliki kaitan erat dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi dan mempertegas variabel-variabel penelitian yang akan dikaji, maka penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengambil variabel *Islamic Human Development Index (I-HDI)*, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Upah Buruh Tani sebagai variabel independen atau bebas (X), serta variabel Tingkat Kemiskinan sebagai variabel terikat atau dependen (Y).
2. Objek penelitian ini adalah Pulau Jawa yang mencakup enam provinsi yaitu; Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur.
3. Penelitian ini mengambil rentang waktu selama satu dekade terakhir yaitu dari tahun 2014 hingga 2023.
4. Penelitian ini mengkaji pengaruh *I-HDI*, NTP, dan Upah Buruh Tani terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2014-2023.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Islamic Human Development Index (I-HDI)* berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2014-2023?
2. Apakah Nilai Tukar Petani (NTP) berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2014-2023?

3. Apakah Upah Buruh Tani berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2014-2023?
4. Apakah *Islamic Human Development Index (I-HDI)*, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Upah Buruh Tani berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2014-2023?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Islamic Human Development Index (I-HDI)* secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2014-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Nilai Tukar Petani (NTP) secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2014-2023.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Upah Buruh Tani secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2014-2023.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Islamic Human Development Index (I-HDI)*, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Upah Buruh Tani secara simultan terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2014-2023.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber bacaan dan informasi baru yang bermanfaat bagi seluruh kalangan khususnya bagi mahasiswa/i Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu berkontribusi terhadap pengembangan pemahaman mengenai korelasi antara kualitas manusia, kesejahteraan petani, dan tingkat kemiskinan dalam perspektif kajian ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil dan temuan dari penelitian ini mampu membantu penulis untuk meningkatkan keterampilan analisis data serta memahami kompleksitas dalam dinamika sosial-ekonomi. Selain itu, penulis dapat memahami lebih dalam terkait isu-isu kemiskinan yang dipengaruhi oleh sektor pertanian dan kualitas manusia dalam perspektif Islam.

b. Bagi Pembaca dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih lanjut bagi para pembaca terkait dengan masalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat khususnya yang melibatkan kalangan petani sehingga mampu meningkatkan keterlibatan sosial untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Selain itu bagi masyarakat maupun organisasi non-pemerintah diharapkan mampu bekerja sama dalam merancang strategi dan solusi untuk mengatasi kemiskinan melalui sektor pertanian.

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan									
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust
8.	Analisis dan Interpretasi Data										
9.	Penyusunan Skripsi										
10.	Bimbingan Skripsi										
11.	Seminar Akhir Skripsi										
12.	Revisi Hasil Seminar Akhir Skripsi										

Sumber: diolah peneliti (2025)

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan tentang deskripsi konseptual teori yang diambil dalam penelitian ini, penelitian yang relevan, kerangka berpikir dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini merupakan metodologi penelitian yang berisikan tentang bagaimana peneliti mengolah sebuah fenomena atau masalah menjadi sebuah penelitian. Pada bab ini mencakup metode dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang deskripsi data, pengujian hipotesis, pembahasan hasil penelitian, implikasi penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan penutup dari skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian untuk perkembangan teori dan solusi praktis bagi pihak terkait.